

Daulat Pangan Dalam

TANGGAL 16 Oktober kemarin diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia (HPS). Peringatan ini diselenggarakan sejak Food and Agriculture Organization (FAO), salah satu badan PBB, menetapkan World Food Day melalui Resolusi PBB Nomor 1/1979 di Roma, Italia. Tanggal 16 Oktober dipilih karena bertepatan dengan terbentuknya FAO. Peringatan HPS di Indonesia dapat menjadi momentum kepedulian terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi. Ketersediaan pangan saat ini memang perlu mendapat perhatian serius seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, konversi lahan pertanian menjadi tempat pemukiman dan industri, serta perubahan iklim yang semakin ekstrim.

Tahun ini sebagian besar wilayah di Indonesia sedang dilanda kekeringan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kekeringan berarti ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air baik untuk

kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan yang terjadi saat ini termasuk kekeringan alamiah. Penyebabnya bisa secara meteorologis yang berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Bisa pula merupakan kekeringan hidrologis karena kurangnya pasokan air permukaan dan air tanah.

Posisi geografis di antara dua benua dan dilintasi garis khatulistiwa merupakan faktor klimatologis yang menyebabkan kekeringan maupun banjir di Indonesia. Kekeringan di Indonesia berkaitan erat dengan fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation). Akibatnya curah hujan menurun tajam, akhir musim kemarau dan awal musim hujan mundur dari normal. Deret hari kering yang semakin panjang seperti dialami sekarang ini memberi pengaruh signifikan bagi pertanian tanaman pangan. Selain menurunkan produktivitas, kekeringan juga mengancam pemenuhan

kebutuhan pangan nasional.

Daulat pangan dan tata kelola air

Kerawanan pangan yang disebabkan oleh ancaman kekeringan dapat diatasi melalui tata kelola air yang efektif. Ironis memang, di musim hujan terjadi banjir yang merusak dan menghancurkan tanaman pertanian, sebaliknya di musim kering tanaman mengalami puso, debit air menurun, serta menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Kenyataan ini memberi tantangan bagi pemerintahan mendatang untuk merumuskan kebijakan yang tepat bagi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang siap mengantisipasi ancaman iklim.

Jalan perubahan yang ditawarkan oleh Jokowi-JK salah satunya adalah kemandirian yang menyejahterakan. Di dalamnya mencakup pula daulat pangan yang berbasis agribisnis kerakyatan. Ikrar membangun kedaulatan pangan yang tercantum dalam Na-

wacita dapat diawali dengan kebijakan tata kelola air. Persoalan kekeringan maupun banjir dapat teratasi dengan memastikan ketersediaan air melalui tata kelola air yang efektif.

Pengelolaan sumber daya air terutama untuk keperluan pertanian dapat dilakukan dengan mengefektifkan waduk, situ, dan sungai. Jangan hanya pengembangan infrastruktur seperti pembangunan maupun revitalisasi bendungan yang diutamakan, namun jauh lebih penting mendorong pemanfaatannya untuk mendukung pertanian. Upaya ini harus didukung pula oleh tata kelola lingkungan dan ruang.

Kenyataannya sekarang banyak lahan terbuka hijau yang mendukung fungsi penyerapan air terancam oleh pengembangan pemukiman dan tata kelola ruang yang asal-asalan. Tidak sekedar butuh aturan main yang jelas namun juga kesadaran masyarakat dan para pemilik modal terhadap lingkungan dan masa depan umat ma-

I m Nawacita

nesia. Di sinilah perlunya revolusi karakter bangsa sebagaimana diusung pula oleh Jokowi-JK.

Daulat pangan dan kemandirian ekonomi

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan pangan baik dari produksi sendiri maupun impor. Ini berbeda dengan daulat pangan yang berarti pemenuhan pangan semata-mata dengan mengupayakan produksi sendiri. Dengan kekayaan alam yang luar biasa ditambah pola kehidupan masyarakat sejak dulu yang agraris-maritim menjadi suatu keniscayaan bagi Indonesia mencapai daulat pangan. Potensi lokal sangat memungkinkan untuk dikembangkan bersama dengan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat setempat.

Kemajuan produksi pangan nantinya harus didukung sistem pemasaran yang siap mengusung produk lokal untuk bersaing dengan produk luar. Pasar bebas Asia Tenggara atau MEA tahun

2015 sudah di depan mata. Inilah tantangan yang harus dihadapi di era globalisasi dan perdagangan bebas. Jika produk pangan lokal kalah bersaing dengan produk pangan impor yang membanjiri pasar konsumen, bukan tidak mungkin kerawanan pangan menjadi lebih rentan. Ancaman bertambah tidak hanya faktor alam namun juga inflasi dan kenaikan harga pangan yang tidak diimbangi dengan kenaikan daya beli masyarakat.

Kemandirian pangan menjadi hal yang sangat mendesak saat ini. Dibutuhkan kerja sama dan sinergi semua pihak, terutama petani dan pemerintah. Tujuannya agar mampu meningkatkan produksi pangan lokal yang bergizi, berkesinambungan, dan dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Jika ini terwujud, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi salah satu negara yang turut berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan dunia. Peringatan HPS tahun 2014 ini kiranya dapat men-

jadi awal bagi pemerintahan baru mewujudkan daulat pangan seperti telah tertuang dalam Nawacita.

***Hendra Kurniawan, M.Pd.,**
Dosen Pendidikan Sejarah
FKIP Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.*